

TESIS

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH MAJELIS PENGAWAS
DAERAH NOTARIS TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN
JABATANNYA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD PAJRI, S.H

NIM. 1820123056

PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. ISMANSYAH S.H., M.H**
- 2. Dr. AZMI FENDRI, S.H., M.Kn**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

(Muhammad Pajri, NIM. 1820123056, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, vii + 108 Halaman, 2022)

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan. Pengawas dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Oleh karena cukup banyaknya Notaris yang berada di Kabupaten Padang Pariaman yang sepanjang dapat penulis lihat dan perhatikan juga melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut maka Penulis, mengambil fokus penelitian pada bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman terhadap Notaris yang berada di Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan jabatannya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundangan hukum berlaku efektif. Hasil Penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan yang Dilakukan Oleh Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Padang Pariaman yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, menanggapi dengan maksimal pengaduan-pengaduan masyarakat mengenai Notaris yang diduga melakukan pelanggaran, melaksanakan penyerahan protokol. (2) Bentuk-Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan oleh Notaris yang berada dalam Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Pariaman yaitu Kurangnya kejujuran dan kedisiplinan Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris tersebut melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, dalam hal ini Notaris sangat mempercayai karyawannya untuk menerima dan menyimpan biaya yang dititipkan oleh klien kepadanya. Ketika biaya telah dititipkan oleh kliennya Notaris tersebut, namun karyawannya tidak melaporkan ada titipan biaya pengurusan tersebut kepada notarisnya. Sehingga, Notaris tersebut harus bersedia bertanggung jawab dalam hal demikian untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh kliennya tersebut. (3) Proses Penegakkan Hukum oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Pariaman akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris. Apabila Notaris yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) Pariaman akan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali. Jika Notaris tidak memperbaiki kinerjanya maka laporan akan dilanjutkan/direkomendasikan ke Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: Pengawasan, Majelis Pengawas Daerah Notaris, Notaris

IMPLEMENTATION OF SUPERVISION BY THE NOTARY REGIONAL SUPERVISORY ASSEMBLY ON NOTARIES IN EXECUTING ITS POSITIONS IN PADANG PARIAMAN REGENCY

(Muhammad Pajri, NIM. 1820123056, Master of Notary, Post-Graduate Program, Faculty of Law Andalas University, vii + 108 Pages, 2022)

ABSTRACT

A notary is a public official who is only authorized to make an authentic deed regarding all deeds, agreements and stipulations. Supervision and inspection of Notaries are carried out by the Supervisory Council, in which there is a Notary element, thus at least Notaries are supervised and examined by members of the Supervisory Council who understand the world of Notaries. Because there are quite a number of Notaries in Padang Pariaman Regency, as long as the author can see and pay attention to these violations, the author focuses on research on how the implementation of supervision by the Pariaman Regional Supervisory Council against Notaries in Padang Pariaman Regency in carrying out their positions. . The research method used in this research is Sociological Juridical, which is an approach taken to analyze the extent to which a legal regulation is effective. The results of this study are (1) the implementation of supervision and guidance carried out by the Regional Supervisory Council in Padang Pariaman Regency, namely providing guidance and supervision to notaries, responding maximally to public complaints about notaries suspected of committing violations, carrying out protocol submissions. (2) Forms of Violations Committed by Notaries who are under the Supervision of the Pariaman Regional Supervisory Council, namely Lack of honesty and discipline of the Notary in carrying out his position, the Notary is negligent in carrying out his profession. Because, in this case, the Notary really trusts his employees to receive and save the fees entrusted by the client to him. So, when the fees have been deposited by the notary's client, the employees do not report the management fees deposited to the notary. Thus, the Notary must be willing to be responsible in such a case to reimburse all costs that have been incurred by his client. (3) Law Enforcement Process by the Pariaman Regional Supervisory Council Against Notaries Who Do Violations The Pariaman Regional Supervisory Council (MPD) will conduct a preliminary examination of the violations committed by the Notary. If the Notary concerned is proven to have violated Article 7 paragraph (1) letter a of the UUJN, the Pariaman Regional Supervisory Council (MPD) will summon the person concerned. Summons to Notaries are made a maximum of 3 (three) times. If the Notary does not improve its performance, the report will be continued/recommended to the Supervisory Council of the Province of West Sumatra.

Keywords: Supervision, Notary Regional Supervisory Council, Notary